

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem akuntansi yang handal dan dapat menyediakan informasi keuangan yang diperlukan oleh para pengguna informasi keuangan tersebut secara akurat, relevan, tepat waktu dan reliable. Otonomi daerah merupakan bagian dari demokratisasi dalam menciptakan sistem dimana setiap pemerintahan dituntut untuk mandiri dalam mengelola daerahnya sehingga pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah, sistem pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat dikelola dengan transparan, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat luas (Kayati, 2016). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah (Izzah,2019).

Penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah adalah salah satu syarat dan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang lemah mengakibatkan pengendalian internal yang lemah dan laporan keuangan yang didapatkan pada akhirnya menjadi kurang dapat diandalkan dan kurang relevan dengan pengambilan keputusan. Untuk meningkatkan kegunaan SAKD, diperlukan adanya elemen perilaku dalam organisasi yang mendukung penerapan SAKD, yaitu dengan meningkatkan kegunaan SAKD dalam memenuhi tuntutan publik atas transparansi dan akuntabilitas organisasi sektor publik, termasuk kejelasan tujuan instansi dan dukungan atasan dalam penerapan akuntansi keuangan daerah, dengan demikian SAKD dapat bermanfaat.

Salah satu lembaga pemerintahan yang wajib membuat laporan keuangan adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan perangkat pemerintah daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. Organisasi Perangkat Daerah adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Maka dari itu, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun laporan keuangan dengan baik. Pasalnya, laporan keuangan yang baik merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan sumber untuk menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), oleh karena itu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Laporan Keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi pemerintahan dengan sebaik mungkin.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) pada Kab. Pringsewu menerapkan aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP untuk suatu daerah diberi label SIMDA keuangan program aplikasi komputer SIMDA keuangan ini dimaksudkan untuk membantu pengelolaan keuangan daerah baik di tingkat SKPKD (sebagai entitas pelaporan) maupun di tingkat SKPD (entitas akuntansi). Adanya program aplikasi ini diharapkan bisa memberikan manfaat lebih kepada pemda terutama dalam penyusunan APBD. Tujuan utama adanya aplikasi SIMDA yaitu membantu pemerintah daerah untuk membangun dan menggunakan sistem informasi keuangan dan kinerja untuk tata kelola yang baik termasuk pengendalian transaksi dan informasi yang memadai. SIMDA keuangan sebagai sebuah sistem yang dikemas secara aplikasi berbasis pada sistem informasi akuntansi untuk membantu pengelolaan keuangan daerah berdasarkan atas peraturan yang berlaku, prinsip efektivitas didalam penggunaan aplikasi SIMDA keuangan sangat diperlukan agar penggunaan keuangan daerah dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan, dilaksanakan dengan perencanaan hingga pertanggung jawaban yang cepat, akurat, transparansi, dan akuntabel. Sebagai salah satu bagian dari sistem informasi akuntansi, efektivitas penggunaan SIMDA dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya keterlibatan pemakai pengguna.

Pengembangan sistem memerlukan suatu perencanaan dan pengimplementasian yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan. Suatu keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian menunjukkan bahwa aspek perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi. Suatu studi yang menyelidiki bagaimana individu-individu, kelompok-kelompok, serta struktur mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku dalam organisasi disebut dengan perilaku organisasi. Perilaku mengacu pada apa yang ingin dilakukan oleh orang dalam organisasi, bagaimana orang-orang tersebut dibentuk, dan apa sikap mereka. Aspek keperilakuan yang terdiri dari aspek psikologi, dan psikologi sosial khususnya sikap, motivasi, emosi, dan persepsi pegawai yang ada pada suatu organisasi berhubungan dengan jalannya penggunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sari, 2020).

Pada peraturan Bupati Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) yang merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu. Road Map Reformasi Birokrasi merupakan instrument dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu. Dokumen ini akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pringsewu tahun 2019, di dalamnya di sebutkan beberapa hal masalah yang perlu diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu terhadap pemerintahan bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) salah satunya yaitu peningkatan kualitas SDM pengelola jaringan online SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah).

Terlepas dari penggunaan sistem akuntansi yang di jalankan, unsur perilaku pegawai pengguna sistem SIMDA yakni psikologi sosiologi khususnya sikap, motivasi, emosi dan persepsi pegawai yang ada pada organisasi perangkat daerah

tersebut berhubungan dengan jalannya penggunaan sistem akuntansi dirasa perlu untuk diteliti pengaruhnya, dimana pada peraturan Bupati RMRB tahun 2019 didalamnya di sebutkan bahwa pengguna sistem aplikasi SIMDA masih harus diperbaiki dan di tingkatkan dalam menjalankan sebuah sistem akuntansi untuk suatu organisasi perangkat daerah tersebut. Tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah untuk menganalisis penggunaan sistem keuangan daerah pada sistem SIMDA di organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Pringsewu. Untuk mengetahui pengaruh sikap, motivasi, emosi dan persepsi terhadap penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah di diterapkan pada OPD Kabupaten Pringsewu.

Penelitian ini mereplikasikan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani, dkk (2020) bahwa sikap, motivasi, dan emosi berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah di kota Malang. Berhubungan dengan fenomena yang sudah dijelaskan sebelumnya terkait masih harus diperbaiki dalam penggunaan sistem SIMDA yang digunakan pada OPD Kabupaten Pringsewu agar pemerintahan bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), sehingga peneliti tertarik untuk meneliti unsur perilaku pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pringsewu yang berhubungan dengan jalannya penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) dimana dalam proses tersebut mudah untuk oknum pegawai nakal melakukan tindak kecurangan yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Yang membedakan dari penelitian terdahulu adalah subjek penelitiannya, subjek yang digunakan yaitu pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya dibidang akuntansi ataupun dibidang keuangan. Dan dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel persepsi karena persepsi adalah cara seseorang melihat atau menginterpretasikan suatu objek, peristiwa, serta manusia (Probonurtjahjo, dkk 2018). Persepsi dilihat dari cara pandang pegawai serta tugas dan pekerjaannya sudah baik atau masih ada kekurangan. Dengan cara pandang

pegawai yang baik terhadap tugas dan pekerjaannya maka berdampak dengan jalannya suatu sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD). Selain itu penelitian ini juga dilakukan pada tahun 2021. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini mencoba menguji variabel mengenai sikap, motivasi, emosi dan persepsi terhadap penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Aspek Keperilakuan Terhadap Penggunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1 Ruang Lingkup Subjek

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pringsewu.

1.2.2 Ruang Lingkup Objek

Ruang Lingkup objek dalam penelitian ini adalah Aspek Keperilakuan dan Penggunaan Sistem Akuntansi.

1.2.3 Ruang Lingkup Penelitian Tempat

Penelitian ini berlokasi di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, Jalan Pemda Pringsewu, Yogyakarta, Gading Rejo, Yogyakarta, Kec. Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung

1.2.4 Ruang Lingkup Waktu

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2021 sampai selesainya penelitian ini.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan urain pada Latar Belakang di atas maka permasalahan yang hendak diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah sikap berpengaruh terhadap penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah?

2. Apakah motivasi berpengaruh terhadap penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah?
3. Apakah emosi berpengaruh terhadap penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah?
4. Apakah persepsi berpengaruh terhadap penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sikap terhadap penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh motivasi terhadap penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh emosi terhadap penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh persepsi terhadap penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dapat menjelaskan pengaruh variabel Aspek Keperilakuan dan Penggunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam dari teori yang telah diperoleh dengan kenyataan yang terjadi.

2. Bagi Pegawai OPD Kabupaten Pringsewu

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pringsewu dalam menerapkan aspek keprilakuan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah.

3. Bagi Institusi

Peneliti berharap penelitian ini dapat berguna sebagai acuan dan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan disusun dengan materi sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Ruang Lingkup Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan tentang “Pengaruh Aspek Keperilakuan Terhadap Penggunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah”.

Bab II : Landasan Teori

Dalam bab ini berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan “Pengaruh Aspek Keperilakuan Terhadap Penggunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah”, serta Penelitian Terdahulu, Kerangka Pikir dan Hipotesis.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini berisikan tentang Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Populasi, Sampel, Variabel Penelitian, Definisi Oprasional Variabel, Metode Analisis Data, serta Pengujian Hipotesis mengenai “Pengaruh Aspek Keperilakuan Terhadap Penggunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah”.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini berisikan Deskripsi Data, Deskripsi Objek Penelitian, Deskripsi Variabel Penelitian, Hasil Analisis Data, Hasil Pengujian Hipotesis, dan Pembahasan terkait “Pengaruh Aspek Keperilakuan Terhadap Penggunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah”.

BAB V : Simpulan dan Saran

Dalam bab ini berisikan Simpulan dan Saran dari hasil pembahasan mengenai “Pengaruh Aspek Keperilakuan Terhadap Penggunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah”.

Daftar Pustaka

Lampiran